

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 105 TENTANG AKUNTANSI
MUDHARABAH PADA PT BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIRTIRIS**

OLEH :

SITI ROHANA

NIM : 10973005836



JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2013

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 105 TENTANG AKUNTANSI MUDHARABAH PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIRTIRIS

Oleh:

SITI ROHANA

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perkreditan rakyat syariah. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah telah menerapkan PSAK No. 105 tentang Akuntabsi Mudharabah.

Ketika melakukan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dan informasi lainnya dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada pihak-pihak yang mempunyai wewenang untuk memberikan data dan penjelasan mengenai penerapan akuntansi mudharabah diperusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, ditemukan beberapa kelemahan dalam penerapan akuntansi mudharabah pada perusahaan ini diantaranya yaitu: cara perhitungan bagi hasil perusahaan menggunakan total pendapatan usaha (omset), seharusnya perusahaan menggunakan laba bruto (gross profit), perusahaan tidak mencatat dana yang diterima sebagai dana syirkah temporer melainkan mencatatnya dalam dana investasi tidak terikat, perusahaan masih menggabungkan dana syirkah temporer dalam neraca pada bagian dana investasi tidak terikat dan belum memisahkan pencatatan antara dana syirkah temporer yang berasal dari bank dan dari bukan bank, dan perusahaan belum menyajikan laporan keuangan secara lengkap, karena hanya menyajikan Neraca, Laporan laba rugi, Laporan sumber dan pnggunaan ZIS, Laporan sumber dan penggunaan Qardh.

Setelah melakukan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penerapan akuntansi mudharabah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Kata kunci : Bagi Hasil, Penyajian Dana Syirkah Temporer, Pengungkapan Dana Syirkah Temporer, dan Penyajian Laporan Keuangan

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah_Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **"ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 105 TENTANG AKUNTANSI MUDHARABAH PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIRTIRIS"**, pembuatan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian Oral Comprehensive sarjana lengkap pada program S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, begitu besarnya pengorbananmu serta luasnya cinta, kasih dan sayangmu, ucapan terima kasih pun rasanya tidak layak kuberikan kepadamu untuk semua pengorbananmu yang tidak lagi dapat terlukiskan. Mungkin hanya lantunan Doa yang mampu Ananda persembahkan.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dony Martias, SE,MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Khairil Henry, SE,M.Si,Ak selaku pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk dan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Oechi Nadira, SE.M.Ak.Ak selaku dosen konsultasi yang telah banyak memberikan petunjuk dan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Desrir Miftah selaku Penasehat Akademis.
8. Bapak dan Ibu Dosen selaku staff pengajar serta Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak pimpinan beserta staff pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
10. Abang dan kakak-kakak ku yang selalu memberi suport dalam penulisan skripsi ini.
11. Buat Calon Suamiku terima kasih karena sudah bersedia menunggu serta memberikan motivasi untukku dalam penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Fatimah, Dian, Nurul, Desmi, Dewi, Ega, Widia, sri sulastri, Irma Yuni dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih karena kalian selalu memberikan dorongan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Temen-temen satu kostku, Kak Ezha, Huzna Dewi, Widya dan Kak Ipit.

Terima kasih karena kalian selalu memberikan dorongan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal saleh. Dan semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan pahala yang berlipat ganda kepada kalian semua. Aamiin Yaa Rabb.....

Pekanbaru, April 2013

Penulis

Siti Rohana

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metodologi Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Pengertian Akuntansi	12
B. Pengertian dan Sejarah Bank Syariah di Indonesia.....	14
C. BPR (Bank Perkreditan Rakyat).....	21
D. Produk BPR Syariah.....	24
E. Bagi hasil.....	25
F. Dana Syirkah Temporer	30
G. Mudharabah	35
H. Jurnal Akuntansi Mudharabah.....	44
I. Contoh Transaksi Mudharabah	45

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdiri Perusahaan	50
B. Visi dan Misi	52
C. Struktur Organisasi Perusahaan.....	52
D. Produk-produk BPRS	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	68
B. Bagi Hasil	70
C. Penyajian Dana Syirkah Temporer.....	73
D. Pengungkapan Dana Syirkah Temporer.....	78
E. Penyajian Laporan Keuangan Syariah	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Contoh Metode Bagi Hasil	4
Tabel II.1	Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	18
Tabel II.2	Contoh Metode Bagi Hasil	26
Tabel II.3	Contoh Akad Mudharabah.....	45
Tabel II.4	Contoh Akad Investasi Mudharabah.....	46
Tabel II.5	Contoh Realisasi Laba Bruto	47
Tabel II.6	Contoh Transaksi Penerimaan Bagi Hasil 1	48
Tabel II.7	Contoh Transaksi Penerimaan Bagi Hasil 2	49
Tabel III.1	Komposisi Pemegang Saham.....	51
Tabel IV.1	Neraca dari PT. BPSR Berkah.....	75
Tabel IV.2	Neraca Setelah Dikoreksi.....	76

DAFTAR GAMBAR

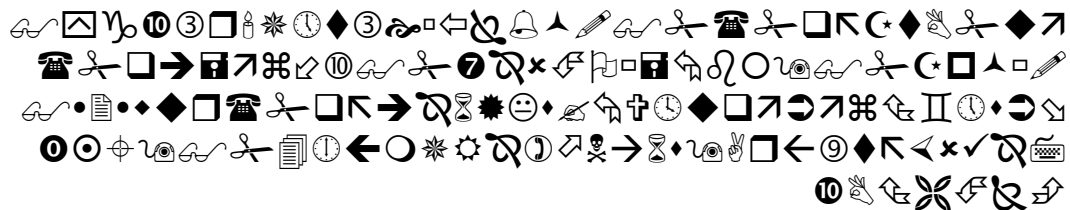
Gambar III.1.....	54
--------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang telah kita ketahui bahwa sudah cukup lama sekali umat Islam di Indonesia menginginkan sistem perekonomian yang berbasia kepada nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic Economic System*) agar dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini juga didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam itu sendiri secara utuh dan secara total seperti yang telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi:



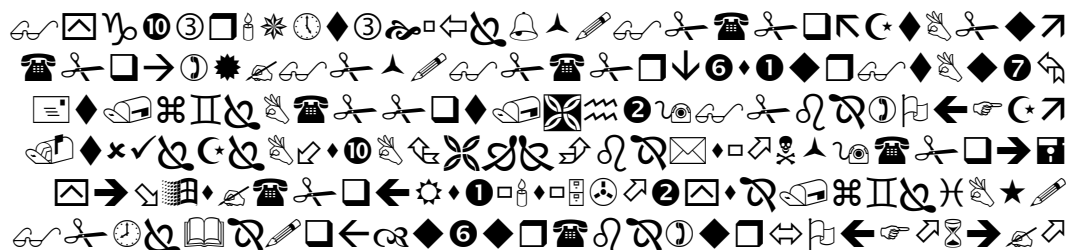
Artinya: “hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara kaffah (keseluruhannya), dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Ayat tersebut diatas dengan tegas menjelaskan bahwa setiap umat Islam didunia diharuskan untuk melaksanakan ajaran Islam secara *universal* atau menyeluruh (*kaffah*), karena didalam ajaran Islam tidak hanya berbicara mengenai ibadah ritual saja tetapi juga mengajarkan mengenai semua aspek kehidupan manusia. Apabila keseluruhan hidup telah berada diatas sendi ajaran Islam, maka akan lahirlah kebahagiaan hakiki yang menjadi tujuan hidup setiap umat manusia.

Dengan semakin berkembangnya pola fikir manusia yang tidak hanya mengedepankan kepentingan duniawi, maka dirasa perlu untuk menyeimbangkannya dengan kepentingan ukhrawi. Akhir-akhir ini terjadi suatu

peningkatan terhadap kajian akuntansi menuju akuntansi dalam perspektif islam atau akuntansi syariah. Beberapa isu yang mendorong munculnya akuntansi syariah adalah masalah harmonisasi standar akuntansi internasional dinegara-negara islam, usulan pemformatan laporan badan usaha islami (Baydoun dan Willett, dalam Muhammad, 2003:79), dan kajian ulang filsafat tentang konstruksi etika dalam pengembangan teori akuntansi sampai pada masalah penilaian (asset) dalam akuntansi. Masalah penting yang perlu diselesaikan adalah perlunya akuntansi syariah yang dapat menjamin terciptanya keadilan ekonomi melalui formalisasi prosedur, aktivitas, pengukuran tujuan, kontrol dan pelaporan yang sesuai dengan prinsip syariah. (Muhammad, 2003:79)

Salah satu aspek yang mendorong akuntansi dengan perspektif islam atau akuntansi syariah di Indonesia adalah dengan munculnya perbankan syariah. Bank syariah dalam usahanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya selalu berlandaskan pada prinsip syariah, antara lain dengan tidak menggunakan sistem bunga untuk aktivitas perbankannya. Karena bunga merupakan jenis riba yang diharamkan dalam islam. Riba merupakan salah satu hal yang dilarang dalam islam, karena juga termasuk dalam kategori mengambil atau memperoleh harta dengan cara yang tidak benar. (Triyuwono & As'udi, 2001:63). Hal ini juga sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-279, yaitu:





Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Kegiatan operasional pada bank syariah terdiri dari kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Selain itu juga ada jasa-jasa perbankan lainnya yang disediakan oleh bank syariah. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam rangka penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan karena dari situlah perbankan dapat bertahan hidup dan berkembang. Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan.

Oleh karena luasnya pembahasan tentang perbankan syariah ini, maka saya selaku penulis memberikan pembatasan masalah mengenai sistem bagi hasil terhadap produk pendanaan pada bank syariah, terutama untuk produk pendanaan dengan akad mudharabah.

Dari penelitian yang telah dilakukan pada PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH, kebanyakan dari produk-produk yang dikembangkan terutama untuk produk pembiayaan yang lebih dominan adalah pembiayaan dengan akad Murabahah atau lebih dikenal dengan sebutan jual beli. Hal ini terlihat dari Neraca pada tahun 2011 yang mana Piutang Murabahah sebesar Rp.11.619.299,00

sedangkan pembiayaan Mudharabah hanya sebesar Rp. 157.066,00. Jadi, hanya 1,6 %saja dari total pembiayaan.Pada umumnya gejala ini juga terjadi pada seluruh lembaga keuangan syariah didunia karena berkaitan dengan resiko bank yang ditimbulkan cukup tinggi apabila menerapkan produk Mudharabah ini. (Muhammad, 2001:50)

Berdasarkan PSAK No.105 tahun 2009Tentang Akuntansi Mudharabah, pembagian hasil usaha Mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba (profit sharing). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omzet). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Tabel I.1
Contoh Perhitungan Metode Bagi Hasil Mudharabah PSAK 105

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba kotor	35	Gross Profit Sharing
Beban	25	
Laba (Rugi) Bersih	10	Profit Sharing

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, PSAK, Per 1 Juli 2009

Dalam praktiknya di bank-bank syariah, mekanisme perhitungan bagi hasil yang sering dipakai adalah revenue sharing. Alasannya jika menggunakan profit sharing resikonya tinggi, dan adanya pembukuan ganda dari pihak penerima dana, akibatnya dengan metode revenue sharing pihak yang selalu diuntungkan adalah pemilik modal.

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris merupakan salah satu Unit Usaha Syariah, dimana salah satu pendapatannya berasal dari pembiayaan Mudharabah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah, dalam penerapan sistem bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105, ditemukan beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah adalah menggunakan total pendapatan usaha (Omset). Menurut PSAK No. 105 pada paragraf 11 menyatakan bahwa “ Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (Gross Profit Sharing) atau bagi laba (Profit sharing), jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian usaha adalah laba bruto bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan itu, jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (Net Profit), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah”.
2. Pada prinsipnya ketika dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah seharusnya diakui sebagai dana syirkah temporer. Menurut PSAK No. 105 pada paragraf 25 menyatakan “Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya”. Namun dalam praktiknya PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah

tidak mencatat dana yang diterima sebagai dana syirkah temporer melainkan mencatatnya dalam dana investasi tidak terikat.

3. Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah saat pengungkapan dana syirkah temporer belum sesuai dengan PSAK No. 105 karena PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah masih menggabungkan dana syirkah temporer dalam neraca pada bagian dana investasi tidak terikat. Seharusnya menurut PSAK No. 105 paragraf 39 menyatakan “Pengelola dana mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi mudharabah, antara lain: (a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. (b) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; (c) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah; dan (d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah ”.
4. Pada BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris belum menyajikan laporan keuangan secara lengkap, karena hanya menyajikan Neraca, Laporan laba rugi, Laporan sumber dan penggunaan ZIS, Laporan sumber dan penggunaan Qardh, dan Laporan Pendapatan dan Bagi hasil. Padahal menurut PSAK No. 105 yang merujuk pada PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah menyatakan bahwa “laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari tujuh komponen, yaitu Neraca, Laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan”.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi objek penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPANPSAK NO. 105TENTANG AKUNTANSI MUDHARABAH PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIRTIRIS“**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan dicari pemecahannya secara umum adalah: *“Apakah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris telah menerapkan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah dengan baik?”*.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Untuk mengetahui apakah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris telah menerapkan PSAK No. 105 Tahun 2009 Tentang Akuntansi Mudharabahdengan baik.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau yang diharapkan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah:

1. *Bagi peneliti*, sebagai bahan kajian untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan penuis khususnya dan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa UIN SUSKA RIAU pada umumnya dalam upaya untuk mengembang ilmu pengetahuan mengenai Ekonomi yang berbasis syariah, khususnya tentang ilmu perbankan syariah di UIN SUSKA RIAU sebagai Kampus Islami Madani.

2. *Bagi perusahaan*, diharapkan agar dapat menjadi bahan evaluasi dan perbandingan serta pertimbangan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem dan produk-produk pada PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH.
3. *Bagi peneliti berikutnya*, semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, bahan masukan dan rujukan atau sebagai inspirasi untuk pengembangan terhadap ilmu ekonomi yang berbasis syariah bagi peneliti yang selanjutnya, karena sebagai pemula penelitian ini masih jauh dari harapan dan titik kesempurnaan.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH, Kantor Pusat Jl Raya Pekanbaru – Bangkinang Km 50 Airtiris Kecamatan kampar Kabupaten Kampar

2. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. *Data primer*, yaitu data yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mengenai keterangan tentang mekanisme penerapan sistem bagi hasil pada PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH, Kantor Pusat Jl Raya Pekanbaru – Bangkinang Km 50 Airtiris Kec. kampar Kab. Kampar.

b. *Data sekunder*, yaitu berupa dokumen-dokumen perusahaan seperti laporan keuangan, struktur organisasi dan data lain yang mendukung dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Data diatas bersumber atau diperoleh dari bagian umum, bagian pemasaran dan bagian akuntansi PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH, Kantor Pusat Jl Raya Pekanbaru – Bangkinang Km 50 Airtiris Kec. kampar Kab. Kampar.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi penulis menggunakan metode observasi lapangan dan dokumentasi. Obsevasi lapangan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan mengenai wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait padaPT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH, Kantor Pusat Jl Raya Pekanbaru – Bangkinang Km 50 Airtiris Kec. kampar Kab. Kampar.Dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen-dokumen yang diperoleh dari perusahaan seperti laporan keuangan dan struktur organisasi.

4. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, data tersebut dianalisis secara deskriptif yaitu dengna cara menyusun dan menguraikan secara cermat dan sistematis kemudian menghubungkan dan membandingkannya dengan teori-teori yang sudah relevan dengan pembahasan skripsi ini sehingga dapat ditemukan pendekatan dan pemecahannya terhadap

masalah yang ada dan kemudian selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan, sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang dapat dirinci sebagai berikut:

BAB I : Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini membahas mengenai landasan teori yang mendukung pembahasan masalah untuk dapat melakukan pembahasan terhadap penelitian lebih lanjut, dimana teori tersebut akan dihubungkan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan ilmu perbankan syariah dan juga teori pembiayaan khusus mudharabah.

BAB III : Bab ini memaparkan tentang gambaran umum perusahaan, yaitu mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan aktivitas perusahaan.

BAB IV : Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Penerapan PSAK No. 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup dari penulisan skripsi yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Akuntansi

APB (Accounting Principle Board) mendefenisikan bahwa “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk menggunakan dalam mengambil keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif”. (Muhammad, 2005:10)

Sedangkan menurut Ralph Estes (*Kamus Akuntansi Edisi Kedua*) dalam TM Husni Kholil (2007:2) akuntansi mempunyai pengertian sebagai berikut: Akuntansi adalah aktifitas yang menyediakan informasi, biasanya bersifat kuantitatif dan sering kali disajikan dalam satuan moneter, untuk pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian sumber daya dan operasi, mengevaluasi prestasi dan pelaporan keuangan kepada para investor, kreditor, instansi yang berwenang serta masyarakat.

Defenisi lainnya menyatakan bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang dimulai dari perolehan data yang memenuhi persyaratan tertentu, penanganan data dalam bentuk pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan penyimpanan untuk kemudian disajikan dalam laporan keuangan yang memuat informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam akuntansi yang menggunakan konsep Double Entry, didalam islam sendiri sudah terdapat ayat yang menunjukkan hal tersebut. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu pada Surat Adz-Zariyaat: 49 yang berbunyi:



 Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Secara umum Muhammad Akhram Khan merumuskan karakteristik akuntansi syariah yang dalam buku Harahap (2004:186) adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan laba rugi agak bersifat subjektif dan bergantung pada nilai, kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercarai hasil yang bijaksana (atau dalam islam sesuai dengan syariah) dan konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan terlindungi.
- b. Mempromosikan dan menilai efesiensi kepemimpinan.

Sistem akuntansi harus mampu memberikan standar berdasarkan hukum syariah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijaksanaan yang baik.

- c. Ketaatan kepada hukum syariah

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit harus dinilai halal dan haramnya. Faktor ekonomi tidak harus menjadi alasan tunggal untuk menentukan berlanjut atau tidaknya suatu organisasi.

- d. Keterikatan para keadilan

Informasi akuntansi harus mampu melaporkan (selanjutnya mencegah) setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat, menambah ketidakadilan dalam masyarakat.

- e. Melaporkan dengan benar

Telah disepakati bahwa penerapan perusahaan dianggap dari sudut pandang yang lebih luas (pada dasarnya bertanggungjawab pada

masyarakat secara keseluruhan). Nilai sosial ekonomi islam harus diikuti dan dianjurkan. Informasi akuntansi harus berbeda dalam posisi terbaik untuk melaporkan hal ini.

f. Perubahan dalam praktek akuntansi

Peranan akuntansi yang begitu luas dalam kerangka islam memerlukan perubahan yang sesuai dan cepat dalam praktek akuntansi sekarang. Oleh karena itu, para ahli akuntansi harus mampu bekerja sama untuk menyusun saran-saran yang tepat untuk mengikuti perubahan ini.

B. Pengertian dan Sejarah Bank Syariah di Indonesia

1. Pengertian

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. (Kasmir, 2002: 378)

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya,. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan Bank adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank syariah adalah bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. (Warkum Soemitra, 2004:5)

Bank syariah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan Universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsi-prinsip syariah. Dalam hal ini praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba di jauhi, untuk diganti dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil. (Slamet Wiyono, 2005:75)

Sedangkan menurut Syafi'i dan Karnaen Perwataatmadja (Perwataatmadja, 2007:1) mengatakan bahwa Bank Syariah adalah:

1. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Bank yang cara operasinya mengacu pada dasar ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.

2. Sejarah Bank Syariah Di Indonesia

Berkembangnya bank-bank dengan landasan syariah islam diberbagai negara pada dekade 1970-an, berpengaruh pula ke Indonesia. Pada awal 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Sejumlah tokoh yang terlibat dalam diskusi itu antara lain: Karnaen A. Perwataatmadja, M. Darwan Rahardjo, A.M. saefuddin, M. Amin Azis, dan beberapa tokoh lainnya. (Mustafa Edwin Nasution, 2006: 294)

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kedudukan bank syariah di Indonesia semakin kukuh pasca disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (Andri Soemitra, 2009: 106)

Menurut Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah. Mekanisme kerja bank syariah adalah sebagai berikut, bank syariah melakukan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasimaupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil/trade financing) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/investment financing). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. (Ascarya, 2007:30)

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. (Kasmir, 2007: 21)

3. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Telah kita ketahui bersama bahwa selama ini fungsi dan peran bank konvensional dikenal sebagai intermediary (penghubung) antar pihak yang kelebihan dan pihak yang membutuhkan dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan, maka bank syariah mempunyai fungsi dan peran yang berbeda dengan bank konvensional, yang diantaranya terangkum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), sebagai berikut: (Harahap, 2004:n5)

1. Manajer Investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Adapun perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidakpastian	Berdasarkan bunga
2.	Operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Dana masyarakat berupa titipan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. - Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. - Penyaluran pada sektor yang menguntungkan tanpa memperhitungkan halal atau tidak sektor tersebut.
3.	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam misi dan visi.	Tidak diketahui secara tegas.
4.	Organisasi	Harus mewakili Dewan Pengawas Syariah	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Sumber: Sudarsono, (2004:42)

4. Tujuan dan Ciri-ciri Bank Syariah

a. Tujuan

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

(Warkum Sumitro, 2004: 17)

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi

kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarah kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk mengurangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang, berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, pembinaan konsumen, pengembangan modal kerja dan pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non-syariah.

b. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional, diantaranya adalah sebagai berikut: (Sudarsono, 2004: 41)

1. Biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar.

Biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang untung ruginya suatu proyek yang dibiayai hanyalah Allah SWT semata.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadiah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank islam harus menguasai dasar-dasar muamalah islam.
6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya kewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

5. Akad dan Aspek Legalitas Bank Syariah

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/ perjanjian yang telah dilakukan apabila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian apabila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.

Setiap akad dalam perbankan syariah baik dalam bentuk barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut ini:

- a. Rukun, seperti: penjual, pembeli, barang, harga dan akad/ijab qabul.
- b. Syarat: barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah, tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan dan tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal.

C. BPR (Bank Perkreditan Rakyat)

1. BPR dan BPR Syariah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, definisi BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Perbedaan BPR Syariah dan BPR Konvensional

Perbedaan BPR Syariah dan BPR Konvensional dilihat dari beberapa segi sebagai berikut:

a. Dari segi akad dan legalitas

BPR Syariah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. *Hukum Islam* adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma; yang mengikat bagi semua pemeluk Islam, dan *hukum positif* adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, nyata dan dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.

Sedangkan BPR Konvensional berdasarkan hukum positif. *Hukum positif* adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, nyata dan dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.

b. Dari segi lembaga penyelesaian sengketa

BPR Syariah jika terjadi perselisihan antara nasabah dengan bank, maka BPR Syariah dapat merujuk ke Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dimana penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan BPR Konvensional jika terjadi perselisihan antara nasabah dengan bank, maka BPR Konvensional merujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dimana penyelesaiannya dilakukan di pengadilan umum.

c. Dari segi organisasi

BPR Syariah mempunyai Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Sedangkan BPR Konvensional tidak mempunyai Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

d. Dari segi investasi

BPR Syariah didalam melakukan investasi tidak terlepas dari kriteria syariah, karena itu BPR Syariah tidak akan mungkin membiayai hal-hal yang diharamkan. Sedangkan BPR Konvensional didalam melakukan investasi tidak melihat halal dan haramnya.

e. Dari segi prinsip operasional

BPR Syariah dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah) dan penyaluran dana masyarakat menggunakan bagi hasil (mudharabah), jual beli (murabahah), dan ijarah (sewa). Sedangkan BPR Konvensional dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat menggunakan bunga.

f. Dari segi tujuan

BPR Syariah tujuannya mencari prifit dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam. Sedangkan BPR Konvensional hanya mencari profit semata.

g. Dari segi hubungan nasabah

BPR Syariah mempunyai hubungan kemitraan. Sedangkan BPR Konvensional mempunyai hubungan debitor dan kreditor.

3. Tujuan BPR Syariah

Tujuan operasional BPR Syariah antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan.
- b) Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c) Membina ukhawah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

(Warkum Sumitro, 2004:129)

D. Produk BPR Syariah

1. Produk Penghimpunan Dana BPR Syariah

Penghimpunan dana BPR Syariah berbentuk tabungan dan deposito. Prinsip operasional BPR Syariah yang ditetapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah:

a. Prinsip wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adala titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan tersebut.

b. Prinsip Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut

kesepakatan dimuka. Dana mudharabah dugunakan untuk produk pembiayaan atau produk penyaluran dana BPR Syariah.

2. Produk Penyaluran BPR Syariah

Dalam penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli.
- b) Pembiayaan dengan prinsip sewa.
- c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
- d) Pembiayaan dengan akad pelengkap.

E. Bagi hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Perbedaan antara sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah tidak diterapkannya bunga sebagai pranata beroperasinya sistem ekonomi tersebut. Dalam sistem ekonomi islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba yang haram hukumnya menurut syariah islamiyah. Sebagai gantinya, sistem ekonomi islam menggantinya dengan pranata bagi hasil yang dihalalkan oleh syariah islamiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. (Wiyono, 2005: 56)

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. (Antonio dkk, 2002:18)

Dari definisi diatas dapat memberikan makna bahwa bagi hasil, terjadinya kontrak kerja sama, dimana pihak-pihak yang terlibat mengadakan kesepakatan atas bagi hasil yang akan diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan. Hubungan

yang terjadi didalam kontrak kerja sama tersebut adalah pemodal dengan pengelola modal.

Dalam bagi hasil antara penyedia dana dan pengelola dana adalah sebagai rekanan kerja yang melakukan kontak sebelumnya untuk tujuan mendapatkan keuntungan bersama. Pihak penyedia dana menanggung resiko berupa tenaga yang dipergunakan dan waktu yang telah terpakai untuk mengelola dana.

Jadi, dalam kegiatan usaha bersama jika terjadi resiko, bila dikaitkan dengan prinsip bagi hasil maka kedua belah pihak akan menanggung resiko dalam keuntungan dan kerugian.

2. Metode Bagi hasil

PSAK No. 105 paragraf 11 menyatakan bahwa “Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (Gross Profit Sharing) atau bagi laba (Profit sharing), jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian usaha adalah laba bruto bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan itu, jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (Net Profit), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Tabel II.2
Contoh Perhitungan Metode Bagi Hasil Mudharabah PSAK 105

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba kotor	35	Gross Profit Sharing
Beban	25	
Laba (Rugi) Bersih	10	Profit Sharing

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, PSAK, Per 1 Juli 2009

Contoh: Perhitungan bagi hasil

Pak Akbar menanamkan dananya di Bank Tabarru' dalam bentuk deposito mudharabah sebesar 500.000.000 dengan akad mudharabah muqayyadah untuk disalurkan dalam pembiayaan pertanian. Dari pembiayaan tersebut pendapatan yang dihasilkan adalah sebesar Rp 2.500.000. Maka berapakah pendapatan Pak Akbar dari dana yang ditanamkan di Bank tersebut? Nisbah bagi hasil untuk nasabah adalah 35:65 dan bobot adalah 0,85.

Jawab:

Dana nasabah : Rp 500.000.000

Dana yang dapat disalurkan : Rp 0,85 x 500.000.000

: = Rp 425.000.000

Dana Bank : 0

Maka: Pendapatan tiap 1000 dana nasabah:

Rasio dana terpakai x Keuntungan x $\frac{1}{\text{Dana Nasabah}} \times 1000$

$$\frac{475.000.000}{500.000.000} \times 2.500.000 \times \frac{1}{500.000.000} \times 1.000 = 4,5$$

$$= 4,5 \times 35\% \times \frac{500.000.000}{1.000}$$

$$= 787.500$$

Jadi pendapatan yang akan diterima oleh Pak Akbar adalah sebesar Rp 787.500

3. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada Bank Konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil dijelaskan sebagai berikut: (Wiyono, 2005: 59)

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut diatas dalam sistem pool of fund, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

4. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah dapat mengikuti tata cara dan ketentuan, yaitu seperti berikut: (Wiyono, 2005: 59)

1. Hitung saldo rata-rata (SRRH) sumberdana sesuai dengan klasifikasi dana yang dimiliki, misalnya tabungan mudharabah dan investasi mudharabah.
2. Hitungan saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan kedalam investasi dan produk-produk asset yang lainnya.
3. Hitung tital pendapatan yang diterima dalam periode berjalan, misanya tahun 2003.
4. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
5. Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.
6. Perhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad.

7. Distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.

5. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil adalah rasio perbandingan pembagian keuntungan antara shahibul maal dan mudharib. (Sudarsono, 2004:99)

Dari definisi diatas dapat diambil pengertian, pembagian hasil diatas keuntungan antar shahibul maal dan mudharib yang terlibat dalam satu kontrak investasi akan dibagi menurut proporsi yang telah disepakati. Atas skill, profesionalisme, waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk mengelola dana shahibul maal, maka mudharib akan mendapatkan imbalan. Dan atas modal yang telah dipergunakan dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, maka shahibul maal akan memperoleh keuntungan.

Nisbah merupakan rasio atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik dana dan pengelola dana yang tertuang dalam akad/perjanjian dan telah ditanda tangani pada awal sebelum dilaksanakannya kerja sama usaha. Apabila dalam akad diperjanjikan bahwa nisbah simpanan mudharabah adala 40:60 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada penabung atau investor atau nasabah adalah 60% dari distribusi pendapatan untuk klasifikasi simpanan mudharabah. Sedangkan untuk bagian bank sebagai pengelola dana adalah 40%. (Wiyono, 2005:62)

F. Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan keuntungan, sedangkan dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. Contoh dari dana syirkah temporer adalah penerimaan dana dari investasi mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, mudharabah musytarakah, dan akun lain yang sejenis. (www.bi.go.id)

1. Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/bank) dalam pengelolaan investasinya.
2. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana membarikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
3. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Sedang menurut PSAK No. 105 pada paragraf 25 menyatakan “Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya”.

Menurut PSAK No. 105 yang merujuk pada PSAK No. 101 tentang penyajian dan pengungkapan Dana syirkah temporer dalam *Neraca pada laporan keuangan syariah ilustrasinya adalah sebagai berikut:*

PT. Bank Syariah “X”
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Per 31 Desember 20X1

ASET	
Kas	xxx
Penempatan pada Bank Indonesia	xxx
Giro pada bank lain	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx
Investasi pada efek/surat berharga	xxx
Piutang:	
Murabahah	xxx
Salam	xxx
Istishna’	xxx
Ijarah	xxx
Pembiayaan:	
Mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx
Persediaan	xxx
Tagihan dan kewajiban akseptasi	xxx
Aset Ijarah	xxx
Aset istishna’ dalam penyelesaian	xxx
Penyertaan pada entitas lain	xxx
Aset tetap dan akumulasi penyusutan	xxx
Aset Lainnya	xxx
Jumlah Aset	xxx
KEWAJIBAN	
Kewajiban segera	xxx
Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx
Simpanan	xxx
Simpanan dari bank lain	xxx
Utang:	

Salam	xxx
Istishna'	xxx
Kewajiban pada bank lain	xxx
Pembiayaan yang diterima	xxx
Utang pajak	xxx
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	xxx
Pinjaman yang diterima	xxx
Kewajiban lainnya	xxx
Pinjaman Subordinasi	xxx
<i>Jumlah kewajiban</i>	<i>xxx</i>
DANA SYIRKAH TEMPORER	
Dana syirkah temporer dari bukan bank:	
Tabungan Mudharabah	xxx
Deposito Mudharabah	xxx
Dana syirkah temporer dari bank:	
Tabungan Mudharabah	xxx
Deposito Mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx
<i>Jumlah Dana Syirkah Temporer</i>	<i>xxx</i>
EKUITAS	
Modal disetor	xxx
Tambahan modal disetor	xxx
Saldo laba (rugi)	xxx
<i>Jumlah Ekuitas</i>	<i>xxx</i>
<i>Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas</i>	<i>xxx</i>

Ilustrasi Penyajian Laporan Laba Rugi menurut PSAK No. 101

PT. Bank Syariah "X"

Laporan Laba Rugi

Per 31 Desember 20X1

**Pendapatan Pengelolaan Dana
oleh Bank sebagai Mudharib**

Pendapatan dari jual beli:

Pendapatan marjin murabahah	xxx
Pendapatan netto salam paralel	xxx
Pendapatan netto istishna' paralel	

Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan netto ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lainnya	xxx
<i>Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib</i>	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
<i>Hak bagi hasil milik bank</i>	xxx
Pendapatan Usaha Lainnya	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
<i>Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya</i>	xxx
Beban Usaha	
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lainnya	(xxx)
<i>Jumlah Beban Usaha</i>	(xxx)
Laba (Rugi) Usaha	xxx
Pendapatan dan Beban Nonusaha	
Pendapatan nonusaha	xxx
Beban nonusaha	(xxx)
<i>Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha</i>	xxx
Beban Pajak	xxx
Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan	xxx

Ilustrasi Penyajian Sumber dan Penggunaan Dana Zakat menurut PSAK No.

PT. Bank Syariah “X”
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
Per 31 Desember 20X1

Sumber Dana Zakat

Zakat dari dalam bank syariah	xxx
Zakat dari pihak luar bank syariah	<u>xxx</u>
<i>Jumlah Sumber Dana Zakat</i>	<i>xxx</i>

Penggunaan Dana Zakat

Fakir	(xxx)
Miskin	(xxx)
Amil	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Orang yang terlilit hutang (Gharim)	(xxx)
Riqab	(xxx)
Fisabilillah	(xxx)
Orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil)(xxx)	
<i>Jumlah Pengguna Dana Zakat</i>	<i>(xxx)</i>

Kenaikan (Penurunan) dana zakat	xxx
Saldo awal dana zakat	xxx
Saldo akhir dana zakat	xxx

Ilustrasi Penyajian Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (Qardh)
menurut PSAK No. 101

PT. Bank Syariah “X”
Laporan Sumber dan Penggunaan Kebajikan
Per 31 Desember 20X1

Sumber Dana Kebajikan

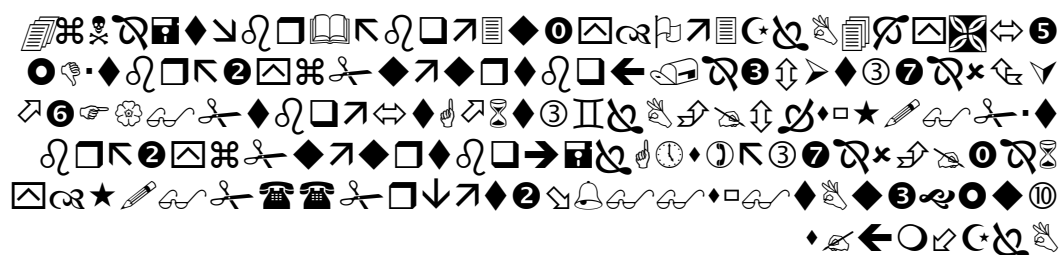
Infak Zakat dari dalam Bank syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx
Denda	xxx

Pendapatan nonhalal	xxx
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	xxx
Penggunaan Dana Kebajikan	(xxx)
Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	(xxx)
Kenaikan (Penurunan) dana kebajikan	xxx
Saldo awal dana kebajikan	xxx
Saldo akhir dana kebajikan	xxx

G. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Syarikat Mudhaarabah memiliki dua istilah yaitu *Al Mudharabah* dan *Al Qiradh* sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum muslimin. Penduduk Irak menggunakan istilah *Al Mudharabah* untuk mengungkapkan transaksi syarikat ini. Disebut sebagai mudharabah karena diambil dari kata *dharb* di muka bumi yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang, Allah berfirman:



“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an.” (Qs. Al Muzammil: 20)

Sedangkan dalam istilah para ulama **Syarikat Mudhaarabah** memiliki pengertian: Pihak pemodal (Investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Dan berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan. Dengan kata lain Al Mudharabah adalah akad (transaksi) antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan.³ Sehingga Al Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*Shahib Al Mal*/Investor) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*Mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.[4] Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari *Shahib Al Mal* dan keahlian dari *Mudharib*.

Islam mensyariatkan akad kerja sama *Mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *Shahib Al Mal* (investor) memanfaatkan keahlian *Mudharib* (pengelola) dan *Mudharib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah Ta'ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. (www.bi.go.id)

Sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi mudharabah, didefinisikan sebagai berikut:

“*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.” (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009)

Dewan Syariah Nasional telah menetapkan aturan tentang pembiayaan Mudharabah sebagaimana yang telah tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 (Himpunan fatwa, edisi kedua, hal 44-49) adalah sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai Shahibul Maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai Mudharib atau pengelola dana.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana dan pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dan bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari Mudharabah kecuali jika Mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar Mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari Mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungandiatur oleh LKS dengan memperhatikan Fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan Ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - 1) Sampai diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Perubahan nisbah berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan atau meqabil modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan.

- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara dua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa salah satu prinsip

penyaluran dana pada Bank Syariah adalah menggunakan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Dalam pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh bank syariah, modal yang diberikan tidak hanya dalam bentuk uang tunai saja namun dapat juga diberikan dalam berbentuk modal non-kas. Pembiayaan mudharabah dapat diaplikasikan apabila nasabahnya memerlukan modal kerja.

2. Standar akuntansi keuangan transaksi mudharabah

PSAK no. 105: Akuntansi mudharabah merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai mudharabah. Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturannya adalah sebagai berikut:

- a. PSAK 105 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib). Namun PSAK ini tidak berlaku untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.

- b. Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk pemilik dana (shahibul maal) dan akuntansi untuk pengelola dana (mudharib) dalam transaksi mudharabah.
- c. Mudharabah yang disebut dalam PSAK ini terdiri dari mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah.
- d. Pada bagian perlakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai pemilik dana penyempurnaan dilakukan untuk:
 - 1. Pengakuan investasi mudharabah pada saat penyaluran dana syirkah temporer, dan
 - 2. Pengakuan keuntungan/kerugian atas penyerahan aset non kas dalam investasi mudharabah.
- e. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi pembelian, penyempurnaan dilakukan untuk:
 - 1. Pengakuan dana syirkah temporer kelolaan;
 - 2. Pengakuan modal mudharib bersama-sama dengan modal pemilik dana (shahibul maal) dalam mudharabah musytarakah.

3. Subtansi PSAK 105: Akuntansi Mudharabah

Karakteristik

- 05. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.
- 06. Mudharabah terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *Mudharabah muqayyadah*, dan *Mudharabah musytaraqah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.
- 07. Dalam mudharabah muqayyadah, contoh batasan antara lain:
 - (a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
 - (b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; dan
 - (c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

08. pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
09. pengembalian dana syirkah temporer dapat dilakukan secara parsial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.
10. jika dari pengelola dana syirkah temporer menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelola dana syirkah temporer menimbulkan kerugian maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

Prinsip Pembagian Hasil Usaha

11. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (Gross Profit Sharing) atau bagi laba (Profit sharing), jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian usaha adalah laba bruto bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan itu, jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (Net Profit), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Pengakuan dan Pengukuran

a. Akuntansi untuk Pemilik Dana

12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:
 - (a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - (b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
 - (i) Nilai wajar yang lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungantanggungan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - (ii) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian.
14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai karena rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.
15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.
17. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang digunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungkan pada saat pemnagian hasil.
18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh:
 - (a) Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi
 - (b) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (force majeure) yang lazim atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - (c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
19. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Penghasilan Usaha

20. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
 21. Kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara lain:
 - (a) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
 - (b) Pengembalian investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
 22. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktiknya dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atau realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
 23. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.
 24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana sebagai piutang jatuh tempo dari pengelola dana.
- b. Akuntansi untuk Pengelola Dana**
25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.
 26. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12-13.

27. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.
28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11.
29. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
30. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.
31. Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah.
32. Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musytarakah.
33. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananyadalam investasi bersama (berdasarkan akad musytarakah). Pemilik dana musytarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pemngelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musytarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musytarakah.
34. Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:
 - (a) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau
 - (b) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
35. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.

Penyajian

36. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
37. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:
 - (a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;

- (b) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

Pengungkapan

38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
- (a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
 - (b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
 - (c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
 - (d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
39. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
- (a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
 - (b) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
 - (c) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah; dan
 - (d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

H. Jurnal Akuntansi Mudharabah

1. Setoran Tabungan Mudharabah

Dr. Kas	xxx	
Kr. Rekening Nasabah		xxx

2. Setoran Deposito Mudharabah

Dr. Kas	xxx	
Kr. Rekening Nasabah		xxx

3. Penarikan Tabungan Mudharabah

Dr. Rekening Nasabah	xxx	
Kr. Kas		xxx

4. Penarikan Deposito Mudharabah

Dr. Rekening Nasabah	xxx	
----------------------	-----	--

Kr. Kas

xxx

I. Contoh Transaksi Mudharabah

Pada tanggal 10 Agustus 20xx, Bank menyetujui pembelian fasilitas mudharabah mutlaqah. PT. Haniyah yang bergerak dibidang SPBU dengan kesempatan sebagai berikut:

- a. Plafon : Rp. 1.450.000.000,-
- b. Objek bagi hasil : Pendapatan (Gross Profit Sharing)
- c. Nisbah : 70% PT. Haniyah dan 30% BMS
- d. Jangka waktu : 10 bulan (Jatuh tempo tanggal 10 juni 20xx)
- e. Biaya Administrasi : Rp. 14. 500.000,-
- f. Pelunasan : Pengembalian Pokok diakhir periode.

Pada saat Penandatanganan Akad Mudharabah

Jurnal pada tanggal 1 Agustus atau pada saat Akad Mudharabah ditandatangani terdiri atas jurnal pembukuan rekening administratif komitmen pembiayaan PT. Haniyah dan jurnal pembebanan administrasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3
Contoh Akad Mudharabah
(Dalam Rupiah)

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
01/08/ 20xx	Dr.Pos lawan komitmen administrasi pembiayaan	1.450.000.000	
	Kr.Kewajiban komitmen administrasi pembiayaan		1.450.000.000
	Dr. Kas/Rekening Nasabah PT. Haniyah	14.500.000	
	Kr. Pendapatan Administrasi		14.500.000

Sumber: Rizal Yaya, (2009:130)

Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 12 disebutkan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non-kas kepada pengelola dana. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan (PSAK 13a)

Misalnya pada tanggal 10 Agustus 20xx, BMS mencairkan pembiayaan Rp. 1.450.000.000,- untuk investasi mudharabah. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4
Contoh Akad Investasi Mudharabah
(Dalam Rupiah)

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
05/10/ 20xx	Dr. Investasi Mudharabah Kr. Kas/rekening nasabah	1.450.000.000,-	1.450.000.000, -
05/10/ 20xx	Dr.Kewajiban komitmen administrasi pembiayaan Kr.Pos lawan komitmen administrasi pembiayaan	1.450.000.000,-	1.450.000.000, -

Sumber: Rizal Yaya, (2009:130)

Penerimaan Bagi Hasil Mudharabah

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 22 dinyatakan bahwa pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Sekiranya bagian hasil usaha belum dibayar oleh pengelola, bagian tersebut diakui sebagai piutang (PSAK 105 paragraf 24)

Berikut adalah realisasi laba bruto PT. Haniyah selama 10 bulan yang dilaporkan setiap tanggal 10, bulan berikutnya. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel II.5
Contoh Realisasi Laba Bruto
(Dalam Rupiah)

No	Bulan	Jumlah Laba Bruto (Rp)	Porsi Bank 30% (Rp)	Tgl Pelaporan Bagi Hasil	Tgl Pembayaran Bagi Hasil
1	Ags XA	20.000.000	6.000.000	10 Sep	10 Sep
2	Sep XA	50.000.000	15.000.000	10 Okt	10 Okt
3	Okt XA	45.000.000	13.500.000	10 Nov	10 Nov
4	Nov XA	40.000.000	12.000.000	10 Des	10 Des
5	Des XA	60.000.000	18.000.000	10 Jan	10 Jan
6	Jan XA	50.000.000	15.000.000	10 Feb	10 Feb
7	Feb XA	40.000.000	12.000.000	10 Mar	10 Mar
8	Mar XA	50.000.000	15.000.000	10 Apr	10 Apr
9	Apr XA	55.000.000	16.500.000	10 Mei	10 Mei
10	Mei XA	60.000.000	18.000.000	15 Jun	15 Jun

Sumber: Rizal Yaya, (2009:131)

Transaksi diatas dapat kita klasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a) Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil, seperti bagi hasil untuk bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Bentuk transaksinya adalah sebagai berikut:

Tabel II.6
Contoh Transaksi Penerimaan Bagi Hasil 1
(Dalam Rupiah)

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
10/09/XA	Dr. Kas/Rekening Nasabah Kr. Pendapatan Bagi hasil Mudharabah	6.000.000	6.000.000
10/10/XA	Dr. Kas/Rekening Nasabah Kr. Pendapatan Bagi hasil Mudharabah	15.000.000	15.000.000
10/11/XA	Dr. Kas/Rekening Nasabah Kr. Pendapatan Bagi hasil Mudharabah	13.500.000	13.500.000
10/12/XA	Dr. Kas/Rekening Nasabah Kr. Pendapatan Bagi hasil Mudharabah	12.000.000	12.000.000
10/01/XA	Dr. Kas/Rekening Nasabah Kr. Pendapatan Bagi hasil Mudharabah	18.000.000	18.000.000
10/02/XA	Dr. Kas/Rekening Nasabah Kr. Pendapatan Bagi hasil Mudharabah	12.000.000	12.000.000
10/03/XA	Dr. Kas/Rekening Nasabah Kr. Pendapatan Bagi hasil Mudharabah	15.000.000	15.000.000
10/04/XA	Dr. Kas/Rekening Nasabah Kr. Pendapatan Bagi hasil Mudharabah	15.000.000	15.000.000

Sember: Rizal Yaya, (2009:132)

- b) Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil seperti pada bagi hasil bulan April dan Mei. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 24, disebutkan bahwa bagi hasil usaha belum dibayar oleh pengelola, maka bagian tersebut diakui sebagai piutang. Bentuk transaksinya adalah sebagai berikut:

Tabel II.7
Contoh Transaksi Penerimaan Bagi Hasil 2
(Dalam Rupiah)

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
10/04/ XB	Dr. Piutang Pendapatan bagi hasil Mudharabah Kr. Pendapatan Bagi hasil Mudharabah-Akrual	16.500.000	16.500.000
05/06/ XB	Dr. Kas/Rekening Nasabah Kr. Piutang Pendapatan Bagi hasil Mudharabah	16.500.000	16.500.000
	Dr. Pendapatan Bagi hasil Mudharabah-Akrual Kr. Pendapatan Bagi hasil Mudharabah	16.500.000	16.500.000
10/06/ XB	Dr. Piutang Pendapatan bagi hasil Mudharabah Kr. Pendapatan Bagi hasil Mudharabah-Akrual	18.000.000	18.000.000
15/06/ XB	Dr. Kas/Rekening Nasabah Kr. Piutang pendapatan Bagi hasil Mudharabah	18.000.000	18.000.000
	Dr. Pendapatan Bagi hasil Mudharabah-Akrual Kr. Pendapatan Bagi hasil Mudharabah	18.000.000	18.000.000

Sumber: Rizal Yaya, (2009:132)

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya BPRS Berkah Dana Fadhlillah

Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah atau disebut PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH yang disingkat dengan Bank Syariah Berkah ini ide awal pendiriannya merupakan hasil musyawarah dari para pendiri yang ingin memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Riau setiap selesai sholat berjamaah dan wirid pengajian di Masjid Al-Khairat, yang beralamat di Jalan Mangga, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Riau.

Para pendiri sebanyak 42 orang bersepakat untuk mendirikan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah yang berkedudukan di Desa Airtiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dengan sepuluh ribu tujuh ratus (10.700) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar seratus tujuh juta rupiah (Rp.107.000.000). Adapun Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kali adalah sebagai berikut:

1. Direksi

a. Direktur Utama : H. Anas Ali

b. Direktur

1. H. Firdaus Effendi
2. H. Masri Datuk Kulabu
3. Fredi Firdaus
4. Ujang Malik, SE

2. Dewan Komisaris

a. Komisaris Utama : Ramlan Zas, SH

b. Komisaris

1. Drs. H. Agus Muhammad
2. Ir. H. Ahmiyul Rauf
3. Drs. H. Syahril Paman
4. Nofiandri, SE

Anggaran Dasar / Akta Pendirian PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah termaktub dalam akta tanggal sebelas Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (11-06-1994), Nomor: 26, dibuat dihadapan Haji MUHAMMAD AFDAL GAZALI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Pekanbaru. Akta tersebut selanjutnya memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 13-11-1995, Nomor:C2-14546.HT.01.01.TH.95.

1. Pemegang Saham

Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Berkah sebagai berikut:

Tabel III.1
Komposisi Pemegang Saham

No	Deskriptif	Persentase
1.	Pemda Kampar	63,23 %
2.	Pengurus	3,47 %
3.	Masyarakat Umum	33,30 %
Total		100 %

Sumber: PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris

B. Visi dan Misi

Berdasarkan uraian diatas dengan ghirah yang tinggi untuk ikut dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kecil dan istiqamah dalam menjalankan nilai-nilai islam maka beberapa pendiri menggariskan kerangka dasar pendirian bank. Visi dan Misi dari PT. BPRS Berkah dana Fadhlillah adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah unggulan yang sehat dan kuat sehingga mampu berperan sebagai motor penggerak dalam memberdayakan ekonomi kemasyarakatan.

b. Misi

1. Menggerakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat dengan menghimpun dan penyalurkan pendanaan untuk usaha-usaha produktif.
2. Meningkatkan kemampuan usaha masyarakat dengan melakukan kerjasama dalam manajemen usaha.
3. Memberikan tingkat keuntungan yang memadai bagi pemegang saham dengan cara-cara yang halal dan diridhoi Allah SWT.
4. Ikut ambil bagian dalam membangkitkan ekonomi kemasyarakatan yang islami.

C. Struktur Organisasi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa struktur organisasi suatu perusahaan baik itu bentuk maupun ragamnya sangat erat sekali hubungannya dengan kegiatan perusahaan. Kegiatan yang dilakukan perusahaan tidak dapat

dilakukan oleh satu orang saja, tetapi juga memerlukan bantuan dari orang lain yang dapat bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang memenuhi syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi yang sehat berarti tiap-tiap satuan organisasinya dapat menjalankan perannya dengan sebaik mungkin. Sedangkan struktur organisasi yang efisien berarti dalam menjalankan perannya tersebut tiap-tiap satuan organisasi dapat mencapai perbandingan yang terbaik antara usaha dan jenis kerja.

Adapun struktur organisasi pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris dapat dilihat pada gambar III.1

Gambar III.1

Sumber: PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, maka tugas dan wewenang masing-masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Direktur Utama

Tugas dan wewenangnya adalah:

- f. Bertanggung jawab pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Airtiris secara keseluruhan dalam tingkat Top Management.
- g. Membuat laporan setiap bulan kepada Bank Indonesia dan RUPS dan berusaha mempertahankan kredibilitas bank.

2. Dewan Pengawas Syariah

Adapun tugas dan wewenang dewan pengawas syariah adalah:

- a. Melakukan pengawasan terhadap produk perbankan dalam rangka menghimpun dan menyebarkan dari dan untuk masyarakat agar berjalan sesuai dengan ketentuan islam.

3. Legal dan Administrasi Pembiayaan

Tugas dan wewenang dari legal dan administrasi pembiayaan ini adalah:

- a. Mengatur, mengkoordinir dan mengawasi semua aktivitas yang berhubungan dengan administrasi pembiayaan.
- b. Melakukan peninjauan jaminan kelapangan bersama dan atau tanpa Account Officer, dalam rangka pengecekan data-data jaminan pembiayaan nasabah terhadap kondisi yang sebenarnya.
- c. Membuat laporan transaksi atau penilaian jaminan, baik dari sisi hukum maupun ekonomis agunan yang diajukan nasabah.

- d. Membuat kelengkapan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan realisasi pembiayaan nasabah (setelah disetujui pejabat yang berwenang, sesuai kapasitas masing-masing) seperti: perjanjian pembiayaan, Offering Letter (surat persetujuan pemberian pembiayaan), Half Sheet pembiayaan, slip; wakalah dan realisasi, biaya administrasi, biaya notaris, biaya asuransi, biaya matrai, tabungan wajib dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan.
- e. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan dokumen yang telah dibuat dan disahkan oleh Accoun Officer sebelum disimpan tempatnya masing-masing. Serta memperhatikan catatan persetujuan Comitte Credit Meeting untuk dipenuhi sebagaimana catatan tersebut.
- f. Melakukan proses pengikatan perjanjian pembiayaan dengan nasabah dengan notaris maupun pengikatan dibawah tangan, sesuai ketentuan masing-masing.
- g. Mengatur dan atau mengkoordinasikan pengikatan jaminan dengan notaris.
- h. Mengatur dan bertanggung jawab terhadap penyerahan sampai dikembalikannya dokumen-dokumen yang diserahkan ke kantor notaris atau karyawannya.
- i. Mengawasi dan mengatur pengarsipan sesuai dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan menurut sistem dan tata laksana yang telah ditetapkan.

- j. Menyimpan dokumen permohonan pembiayaan debitur yang telah direalisasikan beserta usulan pembiayaan yang dibuat AO ketempat yang telah disediakan, dan dokumen perjanjian pembiayaan, akta/ketentuan tambahan (Surat Kuasa Menjual, SKMHT, Pengikatan FIDUCIA), serta jaminan debitur kedalam Mainvault atau tempat yang telah disediakan.
- k. Mengatur peminjaman arsip/dokumen pembiayaan kepada pegawai yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengembalian, kerusakan atau kehilangan dokumen-dokumen tersebut.
- l. Membuat berita acara dan atau administrasi peminjaman, penggantian dan penyerahan (pengembalian) dokumen dan atau jaminan nasabah setelah mendapat persetujuan direksi.
- m. Mempelajari perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen pembiayaan yang telah ada dari segi hukum dan administrasi selanjutnya memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.
- n. Memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum/advis, kepada direksi sehubungan dengan tindakan hukum yang akan diambil perusahaan terutama yang berkenaan dengan pembiayaan.
- o. Membantu tugas-tugas penagihan dan pengambil alihan jaminan yang dilakukan oleh Account Officer.

4. Pimpinan Kantor Kas

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan menyeluruh terhadap kegiatan dan aktivitas kantor pelayanan kas.
- b. Mengupayakan pelayanan optimal kepada nasabah, calon nasabah, dan atau masyarakat di kantor pelayanan kas.
- c. Bersama direksi dan Account Officer membuat rencana pemasaran bank di kantor pelayanan kas.
- d. Melakukan otorisasi pengeluaran uang sesuai dengan batas wewenangnya.
- e. Memeriksa seluruh transaksi yang dilakukan di kantor pelayanan kas.
- f. Melakukan pengecekan dan perhitungan uang kas setiap hari sebelum disimpan di mainvult (brankas)
- g. Menanda tangani bilyet deposito dan buku tabungan nasabah sesuai dengan batas wewenang.
- h. Memasarkan dan melakukan kegiatan pemasaran (penghimpunan dan penyaluran dana) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan dan ketentuan bank.
- i. Melakukan penyaluran dana dan menjaga portofolio pembiayaan pada kondisi lancar dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- j. Meengawasi tingkat kolektibilitas pembiayaan kantor pelayanan kas agar tetap dalam kondisi lancar.
- k. Menindaklanjuti permohonan yang dilakukan oleh calon nasabah, memberikan tanggapan serius sampai adanya keputusan tetap atas jawaban permohonan tersebut.

- l. Melaksanakan dan mengawasi terlaksananya pelayanan yang memuaskan kepada nasabah maupun masyarakat.
- m. Mengawasi penyimpanan dan atau pengarsipan file serta dokumen-dokumen penting pada tempat yang telah disediakan.
- n. Membantu dan mengawasi pembayaran angsuran, pembiayaan jatuh tempo dan segera melakukan penagihan dan upaya penyelesaian jika terjadi tunggakan atau permasalahan angsuran nasabah.
- o. Melakukan kunjungan dan pemantauan terhadap perkembangan usaha debitur.
- p. Melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan yang berada dibawahnya.
- q. Melaporkan secara rutin (semesteran) kinerja karyawan yang berada dibawahnya kepada direksi.
- r. Membayarkan beban dan kewajiban kantor pelayanan kas lainnya yang bersifat rutin dan tepat waktu sesuai dengan wewenang dan kapasitasnya.
- s. Memberikan penugasan yang layak kepada bagian dibawahnya sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing.

5. Account Officer

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Mencari wilayah penyaluran dan penghimpunan dana baru dengan memperhatikan potensi dan peluang produk yang dapat diterima oleh masyarakat.

- b. Mencari debitur dan deposan potensial.
- c. Menjalin kerjasama mitra dengan KUD atau toko-toko elektronik yang berpotensi sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara berkala maupun periodik.
- d. Melempar dana seaman mungkin dengan melakukan analisis pembiayaan secara cermat dan hati-hati terhadap calon debitur.
- e. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mengajukan dan realisasi pembiayaan.
- f. Melakukan pembinaan dan menjaga hubungan baik dengan debitur.
- g. Memonitori pembiayaan yang telah disalurkan dan melakukan penagihan serta penyelesaian pembiayaan debitur menunggak dan atau bermasalah.
- h. Melakukan evaluasi terhadap debitur bermasalah, potensi bermasalah maupun debitur lancar serta memberikan laporan dan rekomendasi sesuai dengan kondisi debitur untuk restrukturisasi, reschedule, reconditioning pembiayaan jika diperlukan.
- i. Membuat laporan secara berkala tentang posisi pembiayaan debitur bermasalah kepada direksi.
- j. Mengembangkan produk-produk penghimpunan dana serta melaksanakan perencanaan strategis yang telah dibuat untuk menarik nasabah deposan sebanyak mungkin.
- k. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepada direksi.

6. Accounting (Pembukuan)

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Menbuat rekening baru yang disampaikan oleh nagian umum dan pembiayaan antara lain:
 1. Pembukuan rekening tabungan dan deposito.
 2. Rekening lain yang diperintahkan dan disetujui oleh direksi.
 3. Pembukuan pekening debitur baru.
- b. Melakukan input transaksi berdasarkan nota yang dibuat sendiri atau oleh bagian lain setelah mendapat persetujuan dari satuan pengawas internal dan atau direksi.
- c. Memeriksa dokuken-dokumen dan atau formulir-formulir yang disampaikan dan atau dibuat petugas atau unit kerja lain sebelum dilakukan input transaksi.
- d. Melaporkan kepada satuan pengawas internal, unit kerja lain dan atau direksi bila terdapat dokumen atau formulir yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- e. Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan harian, dan memeriksa kebenarannya, termasuk menghindari timbulnya selisih transaksi maupun selisih kas.
- f. Membuat nota-nota yang diperlukan sehubungan dengan pembukuan dan memintakan persetujuan satuan pengawasan internal dan atau direksi.

- g. Melakukan verifikasi semua transaksi dibagian operasi sampai keluar neraca percobaan dan neraca harian atau memeriksa input data yang dilakukan sendiri maupun bagian lain, dan mengkoordinasikannya bila terdapat selisih.
- h. Segera melaporkan kepada satuan pengawas internal dan atau direksi bila terjadi selisih yang tidak bisa ditemukan dan bila terjadi kerusakan pada sistem /program pembukuan.
- i. Memeriksa rekening-rekening nasabah maupun lainnya dan menghindari terjadinya error yang menyebabkan timbulnya selisih atau kesalahan dalam laporan maupun daftar rekening.
- j. Melakukan pengawasan terhadap rekening jatuh tempo, mencetak laporannya dan menyampaikan kepada satuan pengawas internal dan atau menyampaikan kebagian lain yang berhubungan dengan rekening dimaksud.
- k. Memantau kewajiban-kewajiban bank yang akan jatuh tempo, melaporkan kebagian yang bersangkutan untuk tindakan selanjutnya.
- l. Melakukan pembaharuan data-data yang sudah tidak aktif lagi setelah mendapat persetujuan direksi.
- m. Bertanggung jawab terhadap pembukuan laporan keuangan, KPMM, UMKM, BMPK, publikasi dan laporan lainnya sehubungan dengan tugas-tugasnya secara harian, bulanan, triwulan semesteran dan tahunan kepada Bank Indonesia, direksi serta pihak ekstern dan intern yang dibutuhkan dan atau diminta langsung oleh direksi.

- n. Bertanggung jawab atas kebenaran transaksi yang di input dan atau laporan-laporan yang dikeluarkan.
- o. Melakukan proses tutup hari, tutup bulan dan tutup tahun secara benar dan cepat agar tidak menjadi penundaan input mutasi harian untuk hari berikutnya.
- p. Meminta rekening koran kepada bank koresponden kemudian melakukan pengecekan saldo rekening dibank tersebut pada akhir bulan untuk menyamakan saldo.
- q. Bagian pembukuan juga bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengarsipan dan dokumentasi arsip-arsip, bilyet deposito, buku tabungan baik yang sudah dipakai maupun yang belum.

7. Personalia

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Membuat perencanaan kebutuhan karyawan dan mengkoordinasikannya dengan direksi.
- b. Melakukan pendapatan dan pemrosesan seleksi penerimaan calon karyawan.
- c. Menerima hasil evaluasi karyawan dari masing-masing pimpinan kerja/atasan langsung karyawan.
- d. Melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan karyawan secara umum.
- e. Memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi dan memiliki nilai lebih dalam kerjanya sebagai pemacu semangat kerja karyawan lainnya.

- f. Membuat laporan rekapitulasi absensi dan penilaian kinerja karyawan.
- g. Membuat rencana kenaikan gaji dan atau pangkat karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Mengusulkan dan melaksanakan secara intern (inhouse training) maupun ekstern serta memelihara hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan khususnya dibidang perbankan.
- i. Mengupayakan terciptanya kedisiplinan karyawan serta menyampaikan usul penindakan administratif dan hukuman disiplin kepada direksi dan atau manajer unit kerja karyawan yang bersangkutan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran.
- j. Mengurus pemindahan dan pemberhentian pegawai sesuai dengan kebutuhan dan keputusan direksi.
- k. Mengeluarkan surat-surat untuk karyawan, perjanjian kerja, peringatan/teguran dengan persetujuan dan atau perintah direksi.
- l. Membayar gaji karyawan sebagaimana tertera dalam daftar gaji.
- m. Mengadministrasikan dan melaporkan keperluan asuransi dan perlindungan pegawai.
- n. Menyelenggarakan kegiatan kerohanian (pengajian-pengajian), rekreasi dan olahraga dilingkungan pegawai bank dalam rangka meningkatkan keimanan dan pemantapan mental serta akhlak pegawai bank.

8. Satuan Pengawas Intern

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Melaksanakan kontrol dan pengawasan melekat kepada pegawai dan aktivitas kerja diseluruh unit perusahaan sehingga akan tercapai efesiensi yang pada tahap berikutnya dapat memperkecil resiko dan atau kesalahan serta kegagalan kerja.
- b. Memeriksa Voucher-voucher pembukuan dengan daftar mutasi mengenai kebenaran posting, nomor rekening dan nominal yang disesuaikan dengan print out.
- c. Mengelola voucher-voucher menurut rekening buku besar dan tanggal pembukuannya.
- d. Memantau persediaan formulir.
- e. Memastikan agar dokumen rahasia dan alat-alat pengamanan tersimpan dan terpelihara sebagaimana mestinya.
- f. Memastikan pengiriman laporan tepat pada waktunya.
- g. Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas transaksi/ voucher pembukuan dan print out data komputer/pembukuan berupa jurnal harian, neraca, rekening lainnya.
- h. Mengontrol dan menganalisa realisasi kinerja keuangan dibanding dengan anggarannya.
- i. Meneliti kembali proses pemmberian dan pengelolaan pembiayaan (termasuk pengecekan kelengkapan dokumen)

- j. Melakukan pemeriksaan khusus (audit) secara periodik terhadap unit kerja bank.
- k. Melakukan inventarisasi tahunan atas persediaan peralatan dan perabotan kantor.
- l. Memeriksa dan menganalisa neraca, laba/rugi, secara up to date.
- m. Memberikan masukan kepada direksi atas suatu permasalahan dan temuan yang ditemukan pada unit kerja bank.
- n. Melaksanakan kontrol terhadap file dan dokumen debitur mengenai persyaratan dan perlengkapan perjanjian pembiayaan.
- o. Memberikan data atau informasi yang diminta oleh pemeriksa ekstern.
- p. Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kontrol/audit harian, triwulan, semesteran, dan tahunan kepada direksi.

D. Produk-produk BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris

- a. Produk pendanaan
 - 1. Tabungan Berkah
 - 2. Tabungan Tarbiyah (Pendidikan)
 - 3. Tabungan Arafah (Haji)
 - 4. Tabungan Qurban
 - 5. Tabunganku
 - 6. Deposito berkah

b. Produk penyaluran dana (pembiayaan)

1. Murabahah (Jual-Beli)
2. Mudharabah (Bagi Hasil)
3. Al Qard (Pinjaman Dana)
4. Multi Jasa
5. Rahn Tasjily

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah mengenai penerapan PSAK No. 105 tentang Akuntansi mudharabah, ditemukan beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah adalah menggunakan total pendapatan usaha (Omset). Menurut PSAK No. 105 pada paragraf 11 menyatakan bahwa “Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (Gross Profit Sharing) atau bagi laba (Profit sharing), jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian usaha adalah laba bruto bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan itu, jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (Net Profit), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah”.
2. Pada prinsipnya ketika dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah seharusnya diakui sebagai dana syirkah temporer. Menurut PSAK No. 105 pada paragraf 25 menyatakan “Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya”. Namun dalam prangkanya PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah

tidak mencatat dana yang diterima sebagai dana syirkah temporer melainkan mencatatnya dalam dana investasi tidak terikat.

3. Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah saat pengungkapan dana syirkah temporer belum sesuai dengan PSAK No. 105 karena PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah masih menggabungkan dana syirkah temporer dalam neraca pada bagian dana investasi tidak terikat. Seharusnya menurut PSAK No. 105 paragraf 39 menyatakan “Pengelola dana mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi mudharabah, antara lain: (a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain; (b) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; (c) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah; dan (d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah ”.
4. Pada BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris belum menyajikan laporan keuangan secara lengkap, karena hanya menyajikan Neraca, Laporan laba rugi, Laporan sumber dan penggunaan ZIS, dan Laporan sumber dan penggunaan Qardh. Padahal menurut PSAK No. 105 yang merujuk pada PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah menyatakan bahwa “laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari tujuh komponen, yaitu Neraca, Laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dan zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan”.

2. Pembahasan Penelitian

1. Bagi Hasil

Produk penyaluran yang terdapat pada BPRS Berkah adalah Mudharabah dengan mengikuti konsep syariah, dimana dalam setiap transaksinya tidak mengenal sistem bunga dalam penghimpunan tabungan maupun investasi masyarakat ataupun untuk transaksi pembiayaan.

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugiannya ditanggung oleh pihak pertama.

Menurut PSAK No. 105 paragraf 11 tentang pembagian hasil usaha atau bagi laba, jika berdasarkan prinsip bagi hasil maka dasar pembagian hasil usahanya adalah dengan laba bruto (gross profit) bukan dengan total pendapatan (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian hasil usahanya adalah dengan laba netto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelola dana mudharabah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, dalam penentuan bagi hasilnya Bank menggunakan total pendapatan usaha. Seharusnya bank menerapkan pembagian hasil usahanya seperti yang telah dijelaskan Menurut PSAK No.105 pada paragraf 11 bahwa Pembagian hasil usahanya berdasarkan laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset).

Contoh: Jika pendapatan yang diperoleh untuk deposito mudharabahnya dalam 1 bulan adalah sebesar Rp. 6.891.949,- dan total dana pihak ketiga deposito dalam jangka waktu 1 bulan juga adalah sebesar Rp. 266.250.000,- dan memiliki deposito nominal Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan (mulai dari tanggal 3 Maret s/d 30 April 20xx) dengan nisbah yang disepakati adalah untuk deposan 31% dan untuk pihak bank adalah 69%. Lalu berapakah jumlah pendapatan bagi hasil yang akan diperoleh?

Jawab: Cara perhitungan yang dilakukan adalah:

$$\text{Rp } (10.000.000,- : 266.250.000) \times \text{Rp. } 6.891.949,- \times 31\% = \text{Rp. } 80.244,-$$

Dari contoh diatas dapat diketahui bahwa PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah ini menggunakan metode perhitungan total pendapatan usaha (omset), dengan demikian ini akan berpengaruh dengan cara perhitungan bagi hasilnya. Namun dalam praktiknya, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah mengaku telah menerapkan sistem perhitungan bagi hasilnya dengan menggunakan laba bruto (gross profit), tapi setelah dilakukan penelitian pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, pihak perusahaan menggunakan perhitungan dengan total pendapat usaha.

Jika PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah ingin menerapkan perhitungan bagi hasil dengan menggunakan laba brotu (gross profit), maka perusahaan harus berani merubah metodenya dengan menggunakan perhitungan laba bruto (gross profit) bukan dengan cara total pendapatan. Jika perusahaan masih menggunakan perhitungan bagi hasil dengan menggunakan total pendapatan usaha bisa jadi pendapatan bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana tidak sesuai dengan

akad dan margin yang didapat. Jadi, dalam hal ini perusahaan harus menerapkan bagi hasil yang sesuai dengan PSAK No. 105 agar sesuai dan agar nantinya tidak terjadi kerugian antara pemilik dana dan pengelola dana.

Jika pendapatan yang diperoleh untuk deposito mudharabahnyanya dalam 1 bulan adalah sebesar Rp. 6.891.949,- dan total dana pihak ketiga deposito dalam jangka waktu 1 bulan juga adalah sebesar Rp. 266.250.000,- dan memiliki deposito nominal Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan (mulai dari tanggal 3 Maret s/d 30 April 20xx) dengan nisbah yang disepakati adalah untuk deposan 31% dan untuk pihak bank adalah 69% dengan bobot 0,75. Maka berapakah nisbah bagi hasil yang akan diperoleh?

Jawab: Berdasarkan Prinsip bagi Hasil

Deposito nominal : Rp 10.000.000

Dana yang dapat disalurkan : $0,75 \times 10.000.000$

: = Rp 7.500.000

Dana Bank : 0

Pendapatan dari pembiayaan : Rp 6.891.949

Maka: Pendapatan tiap 1000 dana nasabah;

Rasio Dana Terpakai x Keuntungan x $\frac{1}{\text{Dana Nasabah}} \times 1000$

$$= \frac{7.500.000}{10.000.000} \times 6.891.949 \times \frac{1}{10.000.000} \times 1000 = 516,896$$

Pendapatan yang akan diterima oleh nasabah:

$$= 516,896 \times 31\% \times \frac{10.000.000}{1000}$$

$$= 160.237,76$$

Jadi nisbah bagi hasil yang akan diperoleh deposan adalah sebesar Rp 160.237,76

2. Penyajian Dana Syirkah Temporer

Akuntansi untuk tabungan mudharabah dan penghimpunan dana bentuk lainnya akan menggunakan akad mudharabah pada dasarnya mengacu pada PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah dan khususnya yang berkaitan dengan akuntansi untuk pengelola dana dan pemilik dana. Berdasarkan PSAK No. 105 yang berkaitan dengan akuntansi mudharabah untuk pengelola dana terdapat dalam paragraf 25 yang menyatakan bahwa “ Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya”.

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan keuntungan, sedangkan dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena entitas syariah tidak berkewajiban ketika mengalami kerugian untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian dari entitas syariah. Dari sisi lain dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan

sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham.

Dana syirkah temporer juga merupakan salah satu unsur dari neraca namun pencatatannya dipisahkan antara dana dari Bukan Bank dan dana dari Bank, jika dana syirkah temporer Bank dan dari Bukan Bank digabungkan dalam satu pencatatan maka akan berpengaruh terhadap bagi hasil usaha perusahaan, karena jika digabungkan maka perusahaan akan kesulitan dalam menghitung keuntungan dan kerugian dana antara tabungan dan deposito yang berasal dari bank dan dari bukan bank.

Dengan demikian sebaiknya perusahaan memisahkan antara pencatatan dana syirkah temporer yang berasal dari Bank dan dari Bukan Bank karena hal ini akan lebih memudahkan perusahaan untuk menentukan besarnya investasi yang didapat dari Bank dan dari Bukan Bank dan akan lebih memudahkan untuk menghitung keuntungan yang akan dibagi hasilnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, dana investasi terikat yang berasal dari bank pada tabungan mudharabah di tahun 2010 senilai Rp. 4.865.225,- dan pada tahun 2011 senilai Rp. 5.876.420,- dan Deposito Mudharabah nya dari dana Investasi terikat yang dari bank pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 698.652,- dan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 615.222,-. Sedangkan dana investasi terikat yang dari bukan bank pada tabungan mudharabah pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 2.038.208,- dan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 4.404.467,- dan deposito Mudharabah dari dana investasi terikat yang berasal dari Bukan bank pada tahun 2010 adalah

sebesar Rp. 584.213,- dan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 445.328,-. Pencatatan yang seharusnya disajikan oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1
Neraca

No	POS-POS	Posisi Dec 2011	Posisi Dec 2010
	<u>AKTIVA</u>		
1	Kas	441.314,00	163.654,00
2	Giro Bank Indonesia		
3	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia		
4	Penempatan Pada Bank Lain	2.584.969,00	2.219.218,00
5	PPAP Penempatan Pada Bank Lain	(9.320,00)	(6.464,00)
6	Surat Berharga yang Dimiliki		
7	Piutang Murabahah	11.619.299,00	9.604.496,00
8	PPAP-Piutang Murabahah	(160.744,00)	(101.160,00)
9	Piutang Murabahah Lainnya	43.132,00	23.480,00
10	PPAP-Piutang Murabahah Lainnya	(217,00)	(86,00)
11	Pembiayaan Mudharabah	157.066,00	
12	PPAP-Pembiayaan Mudharabah	(785,00)	
13	Pendapatan yang masih akan Diterima	31.497,00	10.791,00
14	Biaya Dibayar Dimuka	67.627,00	100.128,00
15	Agunan yang Diambil Alih	249.054,00	259.898,00
16	PPAP-Agunan yang Diambil Alih	(77.988,00)	(46.646,00)
17	Aktiva Istishna'		
18	Termin Istishna'		
19	Aktiva Tetap dan Inventaris	843.623,00	705.955,00
20	Akuntansi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	(702.201,00)	(586.395,00)
21	Aktiva Lain-lain	32.511,00	31.544,00
	Jumlah	15.118.837,00	12.378.413,00
	<u>PASIVA</u>		
1	Dana Simpanan	400.856,00	343.096,00
2	Kewajiban Segera Lainnya	39.509,00	37.504,00
3	Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)		
4	Kewajiban Kepada Bank Lain		

5	Surat Berharga Yang Diterbitkan		
6	Kewajiban Lain-lain	647.417,00	1.401.129,00
	Pinjaman Yang Diterima		
7	Modal Pinjaman		
8	Dana Investasi Tidak Terikat		
	a. Tabungan Mudharabah	10.280.887,00	4.865.225,00
	b. Deposito Mudharabah	1.060.550,00	698.652,00
9	Ekuitas		
	a. Modal Disetor	1.132.490,00	1.132.490,00
	b. Tambahan Modal Disetor	1.087.333,00	1.005.753,00
	c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap		
	d. Cadangan	121.900,0	108.701,00
	e. Saldo laba (Rugi)	347.895,00	163.442,00
	Jumlah	15.118.837,00	12.378.413,00

Sumber: PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah

Berdasarkan PSAK No. 101 penyajian laporan keuangan yang benar adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2
Neraca

No	POS-POS	Posisi Dec 2011	Posisi Dec 2010
	<u>AKTIVA</u>		
1	Kas	441.314,00	163.654,00
2	Giro Bank Indonesia		
3	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia		
4	Penempatan Pada Bank Lain	2.584.969,00	2.219.218,00
5	PPAP Penempatan Pada Bank Lain	(9.320,00)	(6.464,00)
6	Surat Berharga yang Dimiliki		
7	Piutang Murabahah	11.619.299,00	9.604.496,00
8	PPAP-Piutang Murabahah	(160.744,00)	(101.160,00)
9	Piutang Murabahah Lainnya	43.132,00	23.480,00
10	PPAP-Piutang Murabahah Lainnya	(217,00)	(86,00)
11	Pembiayaan Mudharabah	157.066,00	
12	PPAP-Pembiayaan Mudharabah	(785,00)	
13	Pendapatan yang masih akan Diterima	31.497,00	10.791,00

14	Biaya Dibayar Dimuka	67.627,00	100.128,00
15	Agunan yang Diambil Alih	249.054,00	259.898,00
16	PPAP-Agunan yang Diambil Alih	(77.988,00)	(46.646,00)
17	Aktiva Istishna'		
18	Termin Istishna'		
19	Aktiva Tetap dan Inventaris	843.623,00	705.955,00
20	Akuntansi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	(702.201,00)	(586.395,00)
21	Aktiva Lain-lain	32.511,00	31.544,00
Jumlah		15.118.837,00	12.378.413,00
	<u>PASIVA</u>		
1	Dana Simpanan	400.856,00	343.096,00
2	Kewajiban Segera Lainnya	39.509,00	37.504,00
3	Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)		
4	Kewajiban Kepada Bank Lain		
5	Surat Berharga Yang Diterbitkan		
6	Kewajiban Lain-lain	647.417,00	1.401.129,00
	Pinjaman Yang Diterima		
7	Modal Pinjaman		
8	Dana syirkah temporer		
	a. Dari Bank		
	Tabungan Mudharabah	5.876.420,00	4.865.225,00
	Deposito Mudharabah	615.222,00	698.652,00
	b. Dari Bukan Bank		
	Tabungan Mudharabah	4.404.467,00	2.038.208,00
	Deposito Mudharabah	445.326,00	584.213,00
9	Ekuitas		
	a. Modal Disetor	1.132.490,00	1.132.490,00
	b. Tambahan Modal Disetor	1.087.333,00	1.005.753,00
	c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap		
	d. Cadangan	121.900,0	108.701,00
	e. Saldo laba (Rugi)	347.895,00	163.442,00
Jumlah		15.118.837,00	12.378.413,00

Sumber: Data Hasil Olahan

3. Pengungkapan Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer juga merupakan salah satu unsur dari neraca namun menurut PSAK No.105 pada paragraf 39 menyatakan bahwa “Pengelola dana mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi mudharabah, antara lain: (a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. (b) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; (c) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah; dan (d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah ”. Namun dalam hal ini PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah tidak mencatatnya pada catatan atas laporan. Padahal seharusnya pengungkapan Dana Syirkah Temporer ini diungkapkan dituangkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Perusahaan.

4. Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Berdasarkan PSAK No. 105 yang mana pengungkapan yang diperlukan tentang penyajian laporan keuangan syariah harus sesuai dengan PSAK No. 101. Laporan keuangan syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut:

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan arus kas
- d. Laporan perubahan ekuitas
- e. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
- f. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (Qardh); dan
- g. Catatan atas laporan keuangan

Penyajian laporan keuangan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris menurut PSAK No. 101 belum lengkap, karena hanya membuat neraca, laporan laba rugi, Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (Qardh).

Berikut adalah Ilustrasi penyajian laporan Arus kas yang seharusnya dibuat oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah adalah sebagai berikut:

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah
Laporan Arus Kas
Per 31 Dec 2011

Arus Kas dari Aktivitas Operasional

Penerimaan bagi hasil dan <i>fee (ujrah)</i>	xxx
Pembayaran bagi hasil	(xxx)
Penerimaan piutang salam yang telah dihapus	xxx
Pembayaran kas pada karyawan dan pemasok	(<u>xxx</u>)
Laba operasi sebelum perubahan dalam aktiva operasi	xxx

(Kenaikan)/Penurunan dalam Aktiva Operasi:

Dana jangka pendek	
Deposito untuk tujuan pengendalian moneter	xxx
Dana uang muka (<i>urbun</i>) pada langganan	xxx
Surat berharga jangka pendek yang diperjual belikan	xxx

(Kenaikan)/Penurunan dalam Hutang Operasi:

Deposito dari pelanggan	xxx
Kas bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan	xxx
Pajak penghasilan	(<u>xxx</u>)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi setelah pajak penghasilan	xxx

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pelepasan anak perusahaan Y	xxx
Dividen yang diterima	xxx
Bagi hasil yang diterima	xxx
Hasil penjualan surat berharga yang tidak diperjualbelikan	xxx
Pembelian surat berharga yang tidak diperjualbelikan	xxx
 Pembelian tanah, bangunan, dan peralatan	 <u>xxx</u>
 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	 xxx

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Penerbitan modal pinjaman	xxx
Penerbitan saham prioritas oleh anak perusahaan	xxx
Pembayaran kembali pinjaman jangka panjang	xxx
Penurunan bersih pinjaman lain	xxx
 Pembayaran dividen	 <u>xxx</u>
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	xxx
Pengaruh perubahan kurs valuta kas dan setara kas	<u>xxx</u>
 Kenaikan bersih kas dan setara kas	 xxx
Kas dan setara kas pada awal periode	<u>xxx</u>

Kas dan setara kas pada akhir periode xxx

Sumber: <http://www.goegle.com>

Contoh penyajian laporan Arus kas yang seharusnya dibuat oleh PT.

BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris adalah sebagai berikut:

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah

Laporan Arus Kas

Per 31 Dec 2011

Arus Kas dari Aktivitas Operasional

Laba Operasi	Rp. 377.537,00
Penerimaan bagi hasil dan <i>fee (ujrah)</i>	Rp. 38.427,00
Pembayaran bagi hasil	(Rp. 722.452,00)
Pembayaran kas pada karyawan dan pemasok	(Rp. 372.117,00)
Deposito dari pelanggan	Rp. 1.060.550,00
Kas bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan	Rp. 375.666,00
Pajak penghasilan	(Rp. 52.992,00)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi setelah pajak penghasilan	Rp.704.619,00

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kewajiban segera lainnya	(Rp. 39.509,00)
Tabungan wadiah	Rp. 400.856,00
Tabungan Mudharabah	Rp.10.280.887,00
Deposito mudharabah	Rp. 1.060.550,00
Kewajiban lainnya	<u>Rp. 647.417,00</u>
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	<u>Rp.12.350.201,00</u>
Total Arus Kas Per 31 Desember 2011	Rp.13.054.820,00

Sumber : Data Hasil Olahan

Berikut ini adalah ilustrasi Laporan perubahan ekuitas yang seharusnya dibuat oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris adalah sebagai berikut:

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah**Laporan Perubahan Ekuitas****Per 31 Dec 2011**

Laba bersih (satu tahun)	xxx
Pembentukan Cadangan	
Cadangan Umum	xxx
Cadangan Tujuan	xxx
Modal disetor	
Modal Dasar	xxx
Modal yang belum disetor	xxx
Tambahan modal disetor	
Modal sumbangan	<u>xxx</u>
Total Ekuitas per 31 Dec 2011	xxx

Sumber: <http://www.google.com>

Contoh penyajian laporan Perubahan Ekuitas yang seharusnya dibuat oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris adalah sebagai berikut:

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Dec 2011

Laba Bersih	Rp. 347.895,00
Pembentukan Cadangan	
Cadangan Umum	Rp. 121.900,00
Modal Disetor	Rp. 1.132.490,00
Tambahan Modal Disetor	<u>Rp. 1.087.333,00</u>
Total Ekuitas Per 31 Desember 2011	Rp. 2.689.618,00

Sumber : Data Hasil Olahan

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menurut PSAK No. 101 lampiran tentang Laporan Keuangan Bank Syariah pada paragraf 18 menyatakan bahwa bank syariah harus menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai PSAK No. 101 dan PSAK terkait.

Catatan atas laporan keuangan yang dimaksud meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Neraca, Laporan laba rugi, Laporan Arus kas, Laporan perubahan ekuitas, Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (Qardh), serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Namun dalam hal ini perusahaan tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana yang telah disyaratkan menurut PSAK No. 101.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan dan telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

a. Perhitungan Bagi Hasil

Dalam menentukan cara perhitungan bagi hasil usahanya, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris masih melakukan kesalahan pencatatan; yaitu PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah masih menggunakan perhitungan dengan menggunakan total pendapatan (omset) yang biasa disebut dengan metode Revenue Sharing dan belum mengikuti prosedur yang telah diterapkan menurut PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah.

b. Dana Syirkah Temporer

Pada penyajian dana syirkah temporer yang telah dibuat oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah belum sesuai dengan PSAK No. 105, karena PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah belum mencatat dana yang diterima sebagai dana syirkah temporer melainkan menggabungkannya pada dana investasi tidak terikat.

c. Pengungkapan Dana Syirkah Temporer

Dalam pengungkapannya PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah belum sesuai dengan PSAK No. 105, karena PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Masih menggabungkan pencatatan mengenai dana syirkah temporer dalam neraca pada bagian dana investasi tidak terikat. Selain itu PT. BPRS Berkah dana

Fadhlillah juga masih menggabungkan pencatatan dana syirkah temporer yang berasal dari bank dan dari bukan bank. Padahal seharusnya Pencatatan antara dana syirkah temporer yang berasal dari bank dan bukan bank disajikan secara terpisah.

d. Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Dalam penyajiannya PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Belum menyajikan laporan Keuangan secara lengkap, karena menyajikan Neraca, Laporan laba rugi, Laporan sumber dan pnggunaan ZIS, dan Laporan sumber dan penggunaan Qardh. Dengan demikian penyajiannya belum sesuai dengan PSAK No. 105 yang merujuk pada PSAK No. 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menurut PSAK No. 101 lampiran tentang Laporan Keuangan Bank Syariah pada paragraf 18 menyatakan bahwa bank syariah harus menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai PSAK No. 101 dan PSAK terkait. Namun dalam hal ini perusahaan tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana yang telah disyaratkan menurut PSAK No. 101.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan analisa yang telah dilakukan, berikut ini adalah saran yang dapat diberikan, yaitu:

- a. PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah diharapkan dapat menerapkan perhitungan bagi hasil sesuai dengan PSAK No. 105 yang telah diterapkan

selain itu pihak perusahaan juga harus lebih memahami lagi mengenai PSAK No. 105.

- b. Dalam mencatat dana syirkah temporer, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah harus lebih hati-hati lagi karena pencatatan dana syirkah temporer tidak dapat digabungkan ke dalam Dana investasi tidak terikat melainkan harus disajikan secara terpisah.
- c. Diharapkan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah tidak lagi menggabungkan antara pencatatan dana syirkah temporer dan dana investasi tidak terikat, selain itu harus memisahkan antara pencatatan dana syirkah temporer yang berasal dari bank dan dari bukan bank, karena dalam pengungkapannya dana syirkah temporer harus diungkapka sesuai dengan jenisnya.
- d. Diharapkan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah dapat menyajikan Laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 105 yang merujuk pada PSAK No.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah secara lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Andri Soemutra, M.A, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi cetakan 2, Prenada Media: Jakarta.

Antonio, Muhammad Syafi'i, dkk, 2002. *Bank Syariah: Analisis kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Ekonesia: Yogyakarta.

Ascarya, 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Edwin, Mustafa, M.Sc, 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Edisi Pertama, Cetakan ke tiga, Prenada Media Group: Jakarta.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Harahap, Wiroso, Muhammad, 2004. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cet. LPFE Usakti: Jakarta.

Harahap, Sofyan Syafri, 2004. *Akuntansi Islam*, Bumi Aksara: Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 2009 . *PSAK No. 105 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, IAI: Jakarta

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat: Jakarta.

Kasmir, 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.

———, 2007. *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Kholil, TM Husni, 2007. *Kumpulan Materi Pelatihan: Accounting For Syariah Banking*, Bank Riau: Riau.

Muhammad, 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi 2, PT. Salemba Empat: Jakarta.

Nurhayati, Sri Wasilah, 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat: Jakarta.

Perwataatmadja, Karnaen A, 2007. *Bank Syariah Teori, Praktek dan Peranannya*, Caestial Publishing: Jakarta.

Rustam, Bambang Rianto, 2008. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Mumtaz Cendekia Adhitan: Pekanbaru.

Sudarsono, Heri, 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan ke dua, Ekonsia: Yogyakarta.

Sumitro, Warkum, 2004. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Wiyono, Slamet, 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*, PT. Grasindo: Jakarta.

Zulkifli, Sunarto, 2004. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim: Jakarta.

Yaya, Rizal, dkk, 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktik Kontemporer*, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.

<http://syariahberkah.blogspot.com>

www.bi.go.id